



Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia
Volume 5 Nomor 1 Bulan Maret 2020. Halaman 1-4
p-ISSN: 2477-5916 e-ISSN: 2477-8370



Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia is licensed under
A [Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

URGENSI BIMBINGAN KONSELING DALAM PENDIDIKAN NONFORMAL KHUSUSNYA PENDIDIKAN KESETARAAN (*EQUIVALENCY EDUCATION*)

Galuh Mulyawan¹⁾

¹⁾ Magister Bimbingan dan Konseing Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
E-mail: Galuhmulyawan_bk17s2@mahasiswa.unj.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya layanan bimbingan dan konseling juga mengetahui permasalahan yang ada pada jalur pendidikan nonformal khususnya pendidikan kesetaraan. Keadaan di lapangan siswa pendidikan kesetaraan didominasi oleh anak dengan usia 17-20 tahun, beberapa faktor yang membuat siswa berada pada pendidikan kesetaraan adalah kemiskinan, *D.O (droup out)* dan letak geografis. Metode dalam penelitian ini adalah study pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini adalah terdapat permasalahan dalam pendidikan kesetaraan meliputi: 1) masalah pribadi dan sosial dalam pendidikan kesetaraan, 2) permasalahan belajar dalam pendidikan kesetaraan 3) permasalahan karir dalam pendidikan kesetaraan.

Kata Kunci: Bimbingan Konseling; Pendidikan Nonformal; Pendidikan Kesetaraan

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk mempersiapkan generasi dimasa yang akan datang, pendidikan juga menjadi tolak ukur dan eksistensi suatu bangsa di dunia. Di Indonesia sendiri terdapat tiga jalur pendidikan seperti yang terdapat dalam UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 13 ayat 1 dikatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal yang saling melengkapi dan memperkaya.

Dalam praktiknya pendidikan formal merupakan pendidikan yang menjadi prioritas utama dibandingkan dengan dua jalur pendidikan lainnya yaitu pendidikan nonformal dan informal sehingga pendidikan nonformal khususnya dalam jenis pendidikan kesetaraan baik itu kesetaraan paket A yang setara dengan Sekolah Dasar (SD), kesetaraan paket B yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan kesetaraan paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), masih dianggap sebelah mata sehingga muncullah istilah untuk pendidikan nonformal atau juga dikenal dengan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Sosial dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sebagai “sebagai anak tiri” Jawa Pos (17 oktober 1997) dalam [1].

Dikatakan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal tetapi tetap dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang layaknya pendidikan formal. Melihat pentingnya

fungsi pendidikan nonformal, menurut UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 sebagai pengganti, penambah dan juga sebagai pelengkap dari pendidikan formal seharusnya tidak bisa dianggap sebelah mata bahkan harus mendapat perhatian khusus dari semua aspek baik masyarakat, pemerintah dan juga *stake holder* terkait.

Melihat data menurut ikhtisar data Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan Jakarta tahun 2017/2018 di Indonesia sendiri angka putus sekolah masih terbilang tinggi untuk setingkat Sekolah Dasar saja sebanyak 32.127 orang, untuk Sekolah Menengah Pertama sebanyak 51.190 orang, untuk Sekolah Menengah Atas 30.123 orang dan angka putus sekolah yang paling tinggi pada Sekolah Menengah Kejuruan yaitu mencapai 73.388 orang, dan angka tersebut untuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2016/2017 yaitu untuk Sekolah Menengah Pertama sebanyak 38.702 orang dan untuk Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 72.744 orang. Melihat angka putus sekolah yang cukup tinggi diatas pendidikan luar sekolah sangatlah penting sebagai wadah untuk menampung masyarakat yang kurang beruntung [2].

Jika kita melihat angka putus sekolah yang sangat tinggi jalan alternatif untuk memecahkan permasalahan itu adalah salah satunya pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ataupun yang diselenggarakan oleh

perseorangan atau kelompok seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar Pasal 2 menjelaskan program pemerintah wajib belajar dua belas tahun yang artinya setiap individu wajib mengikuti pendidikan hingga setara Sekolah Mengengah Atas (SMA). Namun dalam perjalanannya program tersebut tidak berjalan mulus dikarenakan setiap individu memiliki permasalahannya masing-masing. Jika kita melihat pentingnya persyaratan administratif dalam pencarian pekerjaan setiap perusahaan mematok para pencari kerja dengan pendidikan minimal SMA sederajat. Hal ini menjadi masalah baru apabila masyarakat yang mengalami putus sekolah akan kesulitan mencari pekerjaan, dan hal ini akan menjadikan masalah-masalah baru seperti kemiskinan dan kriminalitas.

Pendidikan nonformal lahir untuk membantu masyarakat yang tidak dapat menikmati pendidikan formal dan tergolong kedalam masyarakat yang tidak beruntung (*Socially Disadvantaged Communitie*). Masyarakat yang tidak dapat menikmati pendidikan formal baik itu putus sekolah ataupun tidak dapat bersekolah dipengaruhi dengan berbagai faktor: (a) anak didik itu sendiri (b) orang tua (c) sistem persekolahan (d) lingkungan sosial peserta didik (e) alokasi yang keliru tentang sumber-sumber pendidikan (f) hubungan timbal balik diantara berbagai sebab yang sangat kompleks. Sedangkan menurut Raharjo & Suminar [3] dalam rangka perluasan akses pendidikan, pendidikan nonformal program kesetaraan berperan sangat penting dan sangat signifikan dalam memberikan layanan pendidikan bagi mereka yang putus sekolah, anak-anak kurang mampu, anak-anak jalanan, anak-anak dari etnis minoritas, anak-anak daerah terpencil dan peserta didik dewasa yang kurang beruntung.

Dengan demikian siswa atau yang biasa disebut warga belajar pada pendidikan nonformal yang menempuh pendidikan kesetaraan merupakan orang yang dapat dikatakan kurang beruntung dalam berbagai aspek dan juga memiliki permasalahan yang kompleks dikarenakan memiliki permasalahan yang bermacam-macam.

Bimbingan konseling merupakan salah satu jalan alternatif bagi permasalahan yang dialami oleh siswa pendidikan kesetaraan, hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus pada siswa agar dapat terciptanya situasi belajar yang kondusif dan fokus dan hal tersebut dapat terlaksana apabila permasalahan yang dialami oleh siswa dapat diselesaikan terlebih dahulu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

Setidaknya terdapat dua kriteria yang biasa digunakan untuk memilih sumber bacaan yaitu (a) prinsip kemutakhiran (*recency*) dan (b) prinsip relevansi (*relevance*). Dalam hal ini penulis menggunakan prinsip relevansi sesuai dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini [4].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan bimbingan dan konseling masih belum menyentuh dunia pendidikan nonformal hal ini disebabkan pendidikan yang dikenal di masyarakat luas adalah pendidikan formal saja layaknya SD, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, sedangkan pendidikan noformal dianggap sebagai pendidikan yang hanya sebagian kecil (minoritas) seperti program pendidikan kesetaraan paket B dan program pendidikan kesetaraan paket C hal tersebut membuat pandangan tentang pendidikan nonformal sebagai “anak tiri” semakin menjadi. Faktor lain juga yang mempengaruhi layanan bimbingan konseling belum masuk pada ranah pendidikan nonformal adalah masih sedikitnya penelitian tentang pentingnya bimbingan dan konseling pada pendidikan nonformal sedangkan keadaan didalamnya sangatlah membutuhkan layanan bimbingan konseling. Pendidikan nonformal khususnya pendidikan kesetaraan. Padahal menurut Gibson & Mitchell [5], layanan bimbingan diperuntukkan bagi semua pihak yang membutuhkan, sehingga dalam hal ini siswa yang membutuhkan layanan bimbingan adalah siswa pendidikan kesetaraan walaupun dalam jalur pendidikan nonformal.

Bimbingan Konseling diperuntukkan bagi semua jenjang sekolah. Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu pendidikan yang disediakan sebagai alternatif dari pendidikan formal, seharusnya pendidikan kesetaraan juga berhak mendapatkan layanan bimbingan konseling yang sama dengan pendidikan formal sebagai tindakan preventif dan juga langkah kuratif pada siswa pendidikan kesetaraan.

Seperti yang terdapat pada kata bimbingan konseling yaitu memiliki dua arti utama yaitu bimbingan dan konseling. Menurut Jones et al 1970 (dalam [6]) bimbingan sendiri merupakan proses pemberian bantuan kepada individu yang bertujuan agar dapat membuat pilihan-pilihan dan keputusan secara bijaksana. Bimbingan juga dilaksanakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokratis bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajibannya memilih jalan hidupnya masing-masing namun dalam membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan tidak diturunkan melainkan harus dikembangkan sendiri oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah siswa.

Melihat fungsi bimbingan konseling Prayitno (dalam [7]) mengelompokkan menjadi empat fungsi pokok yaitu (a) fungsi pemahaman adalah fungsi yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan siswa; (b) fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang akan menghasilkan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan akan timbul, yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu; (c) fungsi

pengentasan, yaitu fungsi yang akan menghasilkan terselesaikannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik; (d) fungsi pemeliharaan dan pengembangan, adalah fungsi yang menghasilkan terpelihara dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara berkelanjutan.

Melihat fungsi bimbingan dan konseling yang begitu krusial hal ini sangat dibutuhkan oleh karakteristik peserta didik yang berada pada pendidikan kesetaraan. Selain fungsi juga terdapat bidang layanan dalam bimbingan konseling. Menurut Yusuf (dalam [8]) terdapat empat bidang layanan bimbingan dan konseling yaitu: bimbingan dan konseling akademik (belajar), bimbingan dan konseling pribadi, bimbingan dan konseling sosial, bimbingan dan konseling karir, dalam hal ini pendidikan kesetaraan sarat akan permasalahan sesuai yang di jelaskan dalam bidang layanan bimbingan konseling.

A. Permasalahan Pribadi Dan Sosial Dalam Pendidikan Kesetaraan

Siswa pada pendidikan kesetaraan saat ini berbeda kondisinya dengan pendidikan kesetaraan dimasa lalu. Dari hasil pengamatan pendidikan kesetaraan di Kota Serang saat ini didominasi oleh siswa-siswa yang mayoritas berumur 18-22 tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian Yustiani, Abdulhak & Pramudia [9] dikatakan bahwa pendidikan kesetaraan didominasi oleh siswa dengan usia 17-20 tahun, yang artinya kondisi saat ini lebih homogen dalam segi usia dibandingkan keadaan pendidikan kesetaraan dimasa lalu dimana kondisinya lebih heterogen dalam segi umur. Jika kita melihat pendidikan kesetaraan saat ini dengan rentang usia yang bisa dikatakan remaja adalah usia dimana mereka seharusnya berada pada sekolah formal (SMA/MA/SMK).

Dengan permasalahan yang melekat pada setiap individu menyebabkan mereka tidak berada pada sekolah formal. Jika kita melihat angka putus sekolah yang sangat tinggi hal itu disebabkan dari berbagai macam faktor. Selain kemiskinan yang menjadi faktor utama dan letak geografis, tingginya angka putus sekolah juga dikarenakan oleh sanksi yang diberikan sekolah kepada siswanya berupa *D.O (Droup Out)* pada siswanya. Pada tahun 2015 angka *D.O SMP/MTs* di Indonesia mencapai 85.000 orang di seluruh Provinsi berdasarkan data dari Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan data angka *D.O (Droup Out)* SLTA setiap tahun pelajaran mengalami peningkatan. Hasil pendataan pada tahun pelajaran 2014/2015 sebanyak 68.219 peserta didik (Ditjen PAUD dan Dikmas, 2016, hlm. V dalam [9]).

Angka kasus *D.O* yang bisa dibilang tidak sedikit hal tersebut dipengaruhi dengan berbagai macam faktor, salah satunya adalah kenakalan remaja. Menurut Santrock (dalam [10]) bahwa kenakalan adalah suatu rentang perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti bertindak berlebihan di sekolah, pelanggaran (melarikan diri dari rumah) hingga tindakan kriminal. Pelanggaran dimaksud adalah tindakan yang termasuk dalam status *offenses* seperti

lari dari rumah, membolos, minum minuman beralkohol, pelacuran, dan ketidakmampuan mengendalikan diri.

Bentuk kenakalan siswa tersebut meliputi kenakalan yang menimbulkan adanya korban fisik pada orang lain. Data UNICEF pada tahun 2016 kekerasan pada sesama remaja di Indonesia diperkirakan mencapai 50%, hal ini sering dikaitkan dengan perilaku *bullying* yang sering terjadi diantara sesama remaja dan tidak jarang *bullying* juga berujung dengan kekerasan yang mengakibatkan adanya korban luka, kenakalan yang menimbulkan korban materi, kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak lain, dan kenakalan yang melawan status.

Banyak faktor penyebab kenakalan siswa selain disebabkan oleh faktor internal akibat perubahan dalam diri remaja, juga disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor. Faktor penyebab tersebut seperti yang dikemukakan oleh Philip Graham dalam Sarwono (dikutip kembali oleh [10]), dibagi kedalam dua golongan yaitu faktor lingkungan dan faktor pribadi. Dapat disimpulkan bahwasanya pada siswa eks-pendidikan formal yang di *Drop Out* kemudian menempuh jalur pendidikan nonformal dalam hal ini pendidikan kesetraraan memiliki permasalahan baik secara pribadi maupun sosial. Oleh karena itu bimbingan konseling sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan baik berupa bimbingan maupun konseling pada siswa yang memiliki permasalahan tersebut.

B. Permasalahan Belajar Dalam Pendidikan Kesetaraan

Permasalahan selanjutnya dalam pendidikan kesetaraan adalah permasalahan belajar. Menurut Husain [11] hasil belajar pada pendidikan kesetaraan paket C memiliki hasil yang rendah, hal ini dapat berdampak pada *output* siswa pendidikan kesetaraan menjadi kurang baik. Permasalahan ini disebabkan oleh faktor eksternal yaitu salah satunya adalah keterbatasan waktu pembelajaran dikelas dan juga keterbatasan sarana dan prasarana yang ada Putra [12], sedangkan dari faktor internal merupakan permasalahan yang timbul dari diri pribadi siswa yang mengikuti pendidikan kesetaraan tersebut dapat berupa motivasi belajar yang rendah. Penyebab rendahnya keberhasilan belajar terletak pada motivasi belajar, motivasi erat kaitannya dengan pembelajaran karena sebagai modal kesiapan peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah ditandai dengan tidak antusias dalam pembelajaran, lebih senang diluar kelas (membolos), cepat merasa bosan, mengantuk, serta pasif (Darsano, dalam [13]).

Keadaan ini juga terjadi berdasarkan hasil observasi pada pendidikan kesetaraan paket C di SKB Kota serang, angka ketidak hadiran siswa mencapai lebih dari 60%. Kehadiran siswa yang rendah mengakibatkan proses pembelajaran yang kurang baik dan berdampak pada penguasaan materi yang relatif rendah dan secara langsung berdampak pada hasil belajar yang rendah [14] keadaan ini perlu diantisipasi dengan pemberian layanan bimbingan konseling dalam upaya untuk mengurangi dampak buruk bagi siswa dibidang pembelajaran.

C. Permasalahan Karir Dalam Pendidikan Kesetaraan

Sangat sedikit sekali pemberian layanan informasi akan pilihan karir baik yang sesuai akan potensi yang dimiliki siswa kesetaraan maupun kebutuhan akan jenis-jenis pekerjaan yang tersedia karena pada dasarnya pendidikan kesetaraan berfokus pada pembelajaran guna menghadapi ujian nasional. Padahal siswa sangat memerlukan informasi ataupun pendidikan karir untuk pengetahuan sehari-hari maupun untuk merencanakan kehidupan dimasa depan, siswa sering mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan dalam menentukan alternatif mana yang harus dipilih.

Salah satunya adalah kesulitan dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan rencana-rencana karir yang akan dipilihnya. Kesulitan-kesulitan untuk mengambil keputusan karir dapat dihindari ketika siswa memiliki sejumlah informasi yang memadai tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia karirnya. Karena itu mereka perlu mendapatkan bimbingan dan pendampingan guna memperoleh pemahaman yang memadai tentang berbagai kondisi dan karakteristik dirinya, baik tentang bakat, minat, citacita, berbagai kekuatan serta kelemahan yang ada dalam dirinya. Hidayati [15] layanan bimbingan karir juga penting bagi siswa pendidikan kesetaraan yang ingin melanjutkan pendidikannya kejenjang perguruan tinggi. Minimnya informasi yang mereka peroleh dapat berdampak pada rendahnya minat siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Melihat pentingnya layanan bimbingan karir, baik berupa informasi sangatlah dibutuhkan bagi siswa pendidikan kesetaraan namun hal ini belum terlaksana karna layanan bimbingan konseling belum masuk dalam ranah pendidikan nonformal khususnya pendidikan kesetaraan hal ini menjadi perhatian khusus baik para konselor maupun para peneliti untuk masuk dalam pendidikan nonformal.

IV. KESIMPULAN

Pendidikan nonformal khususnya pendidikan kesetaraan memiliki beragam permasalahan yang begitu kompleks baik permasalahan pribadi, permasalahan sosial, permasalahan dalam pembelajaran, maupun permasalahan dalam karir. Hal ini perlu perhatian khusus baik dari pemerintahan, tutor, konselor, dan juga *stake holder* terkait bagi pendidikan nonformal agar permasalahan yang di alami oleh peserta didik tidak berlanjut dan dapat diatasi.

Bimbingan dan konseling sebagai alternative dalam pengupayaan pemecahan permasalahan yang ada dalam pendidikan kesetaraan, namun hanya sedikit sekali pengaplikasian layanan bimbingan konseling dalam seting pendidikan nonformal padahal melihat permasalahan yang di alami oleh peserta didik tidak bisa dianggap ringan menjadi perhatian penting agar permasalahan ini dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Supriadi, B. (2010). Kualitas Pendidikan Luar Sekolah Dalam Bidang Pariwisata. *Jurnal PESONA*. ISSN 1410.7252.
- [2] Asran, M. (2011). Pemetaan Masalah-Masalah Pendidikan Nonformal Di Kalimantan Barat: (Implikasi Terhadap Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Bermutu). *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 5(2).
- [3] Raharjo, T. J., & Suminar, T. (2016). Penerapan Pedagogi dan Andragogi pada Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar Paket A, B, dan C Di Kota Semarang. *Edukasi*, 1(1).
- [4] Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra*, 8(1).
- [5] Gibson, R. L., & Mitchell, H. M. (2011). *Bimbingan dan konseling*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- [6] Prayitno & Amti, E. (2013). *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [7] Batuadji, K., Atamimi, N., & Sanmustari, R. B. (2009). Hubungan Antara Efektifitas Fungsi Bimbingan Dan Konseling Dengan Persepsi Siswa Terhadap Bimbingan dan Konseling Di Sekolah Menengah Pertama Stella Duce I Yogyakarta. *Jurnal Psikologi*, 36(1), 18-34.
- [8] Permana, E. J. (2015). Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara. *Psikopedagogia: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4(2), 143-151.
- [9] Yustiani, G., Abdulhak, I., & Pramudia, J. R. (2015). Peran Tutor Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Dalam Pembelajaran Mandiri (Studi Pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Geger Sunten Lembang). *Jurnal Pendidikan Nonformal dan Informal*, 7(2).
- [10] Fuadah, N. (2011). Gambaran Kenakalan Siswa Di SMA Muhammadiyah 4 Kendal. *Jurnal Psikologi Esa Unggul*, 9(01).
- [11] Husain, R. (2015, May). Pengembangan Model Pembelajaran Kolaboratif Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Warga Belajar Paket C (Studi Di Skb Kota Gorontalo). In *Prosiding Seminar Nasional Jurusan PGSD FIP UNP Tahun 2015* (Vol. 1, No. 1).
- [12] Putra, R. A., Kamil, M., & Pramudia, R. J. (2017). Penerapan Metode Pembelajaran Mandiri Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik (Studi pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Bina Mandiri Cipageran). *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 1(1).
- [13] Rimbarizki, R. & Susilo, H. (2017). Penerapan Pembelajaran Daring Kombinasi Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Paket C Vokasi Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pioneer Karanganyar. *J+ PLUS UNESA*, 6(2).
- [14] Nofita, N. A. (2013). Hambatan-Hambatan Warga Belajar Dalam Proses Pembelajaran Program Paket C Di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. *Sepktrum: Jurnal pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(1), 144-160.
- [15] Hidayati, R. (2015). Layanan Informasi Karir Membantu Peserta Didik Dalam Meningkatkan Pemahaman Karir. *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, 1(1).